

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KECAMATAN BULAK
KOTA SURABAYA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya. dengan rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun Anggaran 2025. Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun Anggaran 2025 disusun dalam rangka penyesuaian dan penyelarasan kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga upaya bersama ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh warga Kecamatan dan masyarakat pada umumnya. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam dokumen ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 4 Agustus 2025

CAMAT,



HUDAYA, S.STP.
Benata Tk. I
NIP. 197808101996122001

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Bab I	4
Pendahuluan	4
1.1 Maksud dan Tujuan	4
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Sistematika Penulisan	7
Bab II	9
Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	9
Bab III	15
Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bulak	15
Bab IV	24
Penutup	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Bulak Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Bulak dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 dan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bulak Tahun 2021-2026. Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Bulak Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Bulak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025. Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Bulak Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Kecamatan Bulak dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bulak dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Surabaya.
2. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Bulak tahun 2025.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) Kecamatan Bulak Tahun 2025.
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Bulak Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bulak Tahun 2025 dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

- 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
- 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438)
- 6 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700).
- 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 8 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 9 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438)

- 10 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700).
- 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 12 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578).
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.
- 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4815).
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomorklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 24 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025
- 25 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
- 26 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021
- 27 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya
- 28 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025.
- 29 Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/134/436.1.2/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2025

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai sistematika dokumen penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Bulak Kota Surabaya Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan

- 1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK Kewenangan Kecamatan Bulak, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Bulak.
- 1.3 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Kecamatan Bulak serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BULAK
BAB IV	PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Bulak tahun 2025 dilaksanakan dalam 5 (lima) program yang meliputi : 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik; 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, 4) Program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (5) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Program – program tersebut diwujudkan dalam 10 (sepuluh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Bulak bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan Kecamatan Bulak dalam melaksanakan program dan kegiatannya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi renja Kecamatan Bulak Tahun 2025 sampai dengan triwulan II dijabarkan secara lengkap pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kec. Bulak sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13% x 100%	
7		Unsur Kewilayahan																					
7.01		Kecamatan																					
7.01.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			20.799.535		20.699.160		21.791.985		4.544.496		-		-		-		4.544.496		4.544.496		21,85%
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (1364)		99,82 %		97,73 %		99,36 %		99,11 %		-		-		-		99,11 %		99,11 %		99,29%
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.822.509				17.676.993		3.650.658		-		-		-		3.650.658		3.650.658		21,70%
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gai dan Tunjangan ASN (1416)		100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		100 %		100,00%
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (1409)			16.822.509				17.676.993		3.650.658		-		-		-		3.650.658		3.650.658		21,70%
			Jumlah Orang yang Menerima Gai dan Tunjangan ASN (5045)		65 Orang/bulan		51 Orang/bulan		51 Orang/bulan		50 Orang/bulan		-		-		-		50 Orang/bulan		50 Orang/bulan		76,92%
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.786.799				4.011.035		878.849		-		-		-		878.849		878.849		23,21%
			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (1178)		24 paket		23 paket		24 paket		9 paket		-		-		-		9 paket		9 paket		37,50%
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2306)			3.786.799				4.011.035		878.849		-		-		-		878.849		878.849		23,21%
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (5054)		24 Paket		23 Paket		24 Paket		9 Paket		-		-		-		9 Paket		9 Paket		37,50%
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			190.228				103.557		14.989		-		-		-		14.989		14.989		7,88%
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi (1173)		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		-		-		-		2 unit		2 unit		100,00%
7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / direhabilitasi (2296)			190.228				103.557		14.989		-		-		-		14.989		14.989		7,88%
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (5053)		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		-		-		-		2 Unit		2 Unit		100,00%
7.01.02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			2.134.492		15.184		84.035		2.096		-		-		-		2.096		2.096		0,10%
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah (1106)		100 %		100,00 %		100 %		100,00 %		-		-		-		100,00 %		100,00 %		100,00%
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat (1127)		100 %		100,00 %		100 %		0,00 %		-		-		-		0,00 %		0,00 %		0,00%
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diperincibangkan (998)		25 %		51,85 %		24,45 %		70,59 %		-		-		-		70,59 %		70,59 %		282,36%
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			10.049				6.540		350		-		-		-		350		350		3,88%

Kode	Sasaran	Usuran / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun berjalan 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/6 x 100%	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait [1097]	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan		-		-		-		2 Laporan		2 Laporan		100.00%		
7.01.02.2.01.0001						Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait [2116]		10,049			6,540		390		-		-		-		390		390		3.88%		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait [5046]	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan		-		-		-		2 Laporan		2 Laporan		100.00%		
7.01.02.2.02						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		2,108,477			66,849		1,706		-		-		-		1,706		1,706		0.08%		
							Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan [1103]	158 Lembaga		158 Lembaga		158 Lembaga	158 Lembaga		-		-		-		158 Lembaga		158 Lembaga		100.00%		
7.01.02.2.02.0003						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan [2126]		2,108,477			66,849		1,706		-		-		-		1,706		1,706		0.08%		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan [5047]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan	3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		25.00%		
7.01.02.2.04						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		15,966			10,646		0		-		-		-		0		0		0.00%		
							Jumlah Pelayanan non perizinan yang ditangani [1967]	11 Layanan		12 Layanan		11 Layanan	12 Layanan		-		-		-		12 Layanan		12 Layanan		109.09%		
							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat [1968]	4 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		4 Bidang Urusan	4 Bidang Urusan		-		-		-		4 Bidang Urusan		4 Bidang Urusan		100.00%		
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang Dilaksanakan/Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat [1102]	24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen	6 Dokumen		-		-		-		6 Dokumen		6 Dokumen		25.00%		
7.01.02.2.04.0003						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan [2131]		8,597			2,444		0		-		-		-		0		0		0.00%		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan [5050]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan	3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		25.00%		
7.01.02.2.04.0002						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan [2128]		4,913			4,755		0		-		-		-		0		0		0.00%		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan [5048]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan	3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		25.00%		
7.01.02.2.04.0001						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha [2122]		2,456			3,447		0		-		-		-		0		0		0.00%		
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan [5048]	24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen	6 Dokumen		-		-		-		6 Dokumen		6 Dokumen		25.00%		
7.01.03						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		9,025,650		7,910,327		9,509,739	339,211		-		-		-		339,211		339,211		3.42%		
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi [1209]		100 %		100.00 %		100 %	100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%		
						Persentase kelurahan yang memodalkanal konsep inovasi [915]		100 %		62.50 %		87.5 %	0.00 %		-		-		-		0.00 %		0.00 %		0.00%		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Laju 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
													K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
																											K	Rp.(000)
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 135 x 100%			
7.01.03.2.02					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9,842,748				9,439,947		339,211		-		-		-		-		339,211		339,211		3.40%
					jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan [2062]	5 Lembaga		8 Lembaga		5 Lembaga		0 Lembaga		-		-		-		-		0 Lembaga		0 Lembaga		0.00%		
					Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya [1117]	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		-		-		-		-		0 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00%		
7.01.03.2.02.0002					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [2153]			1,392,974				1,707,996		0		-		-		-		0		0		0		0.00%
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun [5051]	3 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		-		-		-		-		0 Unit		0 Unit		0.00%		
7.01.03.2.02.0002					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [2517]			343,974				1,689,697		0		-		-		-		0		0		0		0.00%
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun [5056]	3 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		-		-		-		-		0 Unit		0 Unit		0.00%		
7.01.03.2.02.0002					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [2518]			675,134				1,263,419		0		-		-		-		0		0		0		0.00%
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun [5057]	3 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		-		-		-		-		0 Unit		0 Unit		0.00%		
7.01.03.2.02.0002					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [2519]			949,596				1,706,563		0		-		-		-		0		0		0		0.00%
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun [5058]	3 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		-		-		-		-		0 Unit		0 Unit		0.00%		
7.01.03.2.02.0003					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [2157]			1,164,376				341,320		37,677		-		-		-		37,677			37,677		3.24%	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [5052]	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-		-		-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00%		
7.01.03.2.02.0003					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [2520]			1,497,398				505,915		62,502		-		-		-		62,502			62,502		4.17%	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [5058]	3 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-		-		-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00%		
7.01.03.2.02.0003					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [2521]			1,901,301				855,964		104,447		-		-		-		104,447			104,447		5.49%	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [5060]	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-		-		-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00%		
7.01.03.2.02.0003					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [2522]			1,911,965				1,363,523		134,585		-		-		-		134,585			134,585		7.04%	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [5061]	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-		-		-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00%		
7.01.03.2.02.0001					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan [2514]			6,029				5,560		0		-		-		-		0			0		0.00%	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan [5055]	5 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		-		-		-		-		0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00%		
7.01.03.2.03					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			82,502				69,792		0		-		-		-		0			0		0.00%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)				
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			
													K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)									
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%				
						Jumlah Lembaga yang sarana (program/sarana untuk Pemberdayaan dapat disediakan (2270)	21 Lembaga		21 Lembaga		21 Lembaga		0 Lembaga		-		-		-		-		0 Lembaga		0 Lembaga		0.00%		
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi (2224)	480 Lembaga		480 Lembaga		480 Lembaga		114 Lembaga		-		-		-		-		114 Lembaga		114 Lembaga		23.75%		
7.01.03.2.03.0004					Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (3225)			3.182			2.760		0		-		-		-		-		0		0		0.00%		
						Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (5062)	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		25.00%		
7.01.03.2.03.0003					Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan (4634)			79.720			67.032		0		-		-		-		-		0		0		0.00%		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (9812)	21 Unit		21 Unit		21 Unit		0 Unit		-		-		-		-		0 Unit		0 Unit		0.00%		
7.01.04					Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			31.844		88.063		109.900		18.272		-		-		-		-		18.272		18.272		57.38%	
						Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan (1371)	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%		
7.01.04.2.01					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			31.844			109.900		18.272		-		-		-		-		18.272		18.272		57.38%		
						Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan (1675)	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		25.00%		
7.01.04.2.01.0001					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (3226)			31.844			109.900		18.272		-		-		-		-		18.272		18.272		57.38%		
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (5063)	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		25.00%		
7.01.05					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			5.862		4.862		3.421		358		-		-		-		-		358		358		6.10%	
						Persentase penanganan potensi konflik sda menjadi konflik di Kecamatan (1372)	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%		
7.01.05.2.01					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah			5.862			3.421		358		-		-		-		-		358		358		6.10%		
						Jumlah laporan potensi konflik yang dapat diantisipasi/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas (1677)	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		25.00%		
						Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitas, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (1909)	34 Orang		46 Orang		33 Orang		0 Orang		-		-		-		-		0 Orang		0 Orang		0.00%		
7.01.05.2.01.0002					Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (3227)			2.512			1.990		0		-		-		-		-		0		0		0.00%		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (3004)	34 Orang		46 Orang		33 Orang		0 Orang		-		-		-		-		0 Orang		0 Orang		0.00%		
7.01.05.2.01.0005					Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketetapan Peraturan Perundang-Undangan (3228)			3.350			1.431		358		-		-		-		-		358		358		10.68%		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11		13 = 8 + 12		14 = 13/5 x100%								
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Keterlaksanaan Peraturan Perundang-Undangan (SOSG)	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan	-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		25.00%		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dasar penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Bulak Kota Surabaya adalah Visi dan Misi Walikota Surabaya. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus sejalan dan dapat mendukung tercapainya visi dan misi tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan dan peraturan-peraturan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan Bulak Kota Surabaya. Untuk mewujudkan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bulak Kota Surabaya didukung dari dana APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bulak tahun 2025 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 yang pada umumnya dapat berupa perubahan output kegiatan maupun sub kegiatan, target capaian kinerja serta kebutuhan dana/pagu indikatif. Perubahan Rencana Kecamatan Bulak Tahun 2025 dirumuskan dalam 5 (lima) program terdiri dari :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
- 4) Program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan
- 5) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Bulak pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 melaksanakan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan yang sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bulak Tahun 2025

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.36 %	21,791,584,843	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.36 %	22,345,967,245	
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	17,676,993,159	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	17,742,676,299	
	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bulak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	17,676,993,159	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bulak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	17,742,676,299	
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 paket	4,011,034,884	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	4,512,569,346	
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bulak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	4,011,034,884	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bulak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4,512,569,346	
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	103,556,800	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	90,721,600	

		7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bulak	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	103,556,800		7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bulak	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	90,721,600	
2	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	84,035,284		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	83,085,928	
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %		
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.45 %					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.45 %		
	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	6,540,000		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	3,540,000	
		7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	6,540,000		7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	3,540,000	

		7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	158 Lembaga	66,848,800		7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	158 Lembaga	66,848,800	
		7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	66,848,800		7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	66,848,800	
		7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	4 Bidang Urusan	10,646,484		7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	4 Bidang Urusan	12,697,128	
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang Dilaksanakan Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	24 Dokumen					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang Dilaksanakan Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	24 Dokumen		
				Jumlah Pelayanan non perizinan yang ditangani	11 Layanan					Jumlah Pelayanan non perizinan yang ditangani	11 Layanan		
		7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan	Kec. Bulak	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen	3,447,360		7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan	Kec. Bulak	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen	6,447,360	

		Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					
		7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	4,755,240		7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	4,755,240	
		7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	2,443,884		7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1,494,528	
3		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	9,509,738,587		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	9,515,843,287	
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %		
		7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	9,439,946,587		7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	9,439,946,587	
				jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	5 Lembaga					jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	5 Lembaga		

				Pembangunan di Kelurahan					Pembangunan di Kelurahan				
		7.01.03.2.02.0001	Kec. Bulak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5,550,000			7.01.03.2.02.0001	Kec. Bulak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5,550,000
		7.01.03.2.02.0002	Kelurahan Bulak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,707,995,747			7.01.03.2.02.0002	Kelurahan Bulak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1,749,440,720
		7.01.03.2.02.0002	Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,689,696,641			7.01.03.2.02.0002	Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1,690,877,794
		7.01.03.2.02.0002	Kelurahan Kenjeran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,263,419,105			7.01.03.2.02.0002	Kelurahan Kenjeran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	1,273,427,371
		7.01.03.2.02.0002	Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,706,563,386			7.01.03.2.02.0002	Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1,706,563,386
		7.01.03.2.02.0003	Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	341,320,183			7.01.03.2.02.0003	Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	340,139,030

		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kenjeran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	505,914,727		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kenjeran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	495,906,461	
		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	855,963,541		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	855,963,541	
		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bulak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,363,523,257		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bulak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,322,078,284	
		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	21 Lembaga	69,792,000		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	21 Lembaga	75,896,700	
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	460 Lembaga					Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	460 Lembaga		
		7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Bulak	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	21 Unit	67,032,000		7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Bulak	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	21 Unit	73,136,700	
		7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	2,760,000		7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	2,760,000	
4		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI		Persentase koordinasi penanganan	100 %	109,899,600		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI		Persentase koordinasi penanganan	100 %	99,819,600	

		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		pelanggaran Perda di Kecamatan			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		pelanggaran Perda di Kecamatan			
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	109,899,600	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	99,819,600	
		7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	109,899,600	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	99,819,600	
5		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	3,420,800	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	3,420,800	
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah laporan potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Laporan	3,420,800	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah laporan potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Laporan	3,420,800	
				Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,k Sosialisasi, Konsultasi)	33 Orang				Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,k Sosialisasi, Konsultasi)	46 Orang		

				Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
		7.01.05.2.01.0002	Kec. Bulak	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	33 Orang	1,990,000		7.01.05.2.01.0002	Kec. Bulak	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	46 Orang	1,990,000	
		7.01.05.2.01.0005	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	1,430,800		7.01.05.2.01.0005	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	1,430,800	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Bulak Tahun 2025 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Kecamatan Bulak pada tahun 2025 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

Perubahan Renja Kecamatan Bulak Tahun 2025 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya. 4 Agustus 2025

CAMAT,

HUDAYA, S.STP.
Penata Tk. I
NIP. 197808101996122001